

## KENDALA DAN PERBAIKAN PENDIDIKAN ISLAM YANG IDEAL: Evaluasi dan Proposisi Terhadap PTKI di Indonesia

Deri Wanto

Dosen IAIN Curup-Bengkulu  
deriwanto56@gmail.com

### Abstract

Every era certainly has a separate challenge. In the development of the Indonesian nation from the old order to the new order era and era to the reform era that seemed to give a very clear feel and color for this nation, especially in the field of education. What has happened? Precisely education in Indonesia to get a new problem, namely the birth of "intersection" policies and "paths of problems" that run until now. Education which is a symbol of the glory and development of the nation-children that must marginalize even more Islamic Education which is part of the institutions under the auspices of the ministry of religion and remain separated in the memories of the ministries of education and culture. This paper is a form of qualitative research library with a sociological approach that sees the history and development of Islamic education at Islamic Religious Higher Education in Indonesia.

**Keywords:** Constraints, Improvement, Islamic Education, Ideal

### Abstrak

Setiap zaman tentu memiliki tantangan yang tersendiri. Dalam perkembangan bangsa Indonesia mulai dari orde lama menuju era orde baru dan berlanjut ke era reformasi yang seakan memberikan nuansa dan warna baru yang begitu mencolok bagi bangsa ini, khususnya pada bidang pendidikan. Namun apa yang terjadi? Justru pendidikan di Indonesia mendapatkan problem baru, yakni lahirnya "persimpangan" kebijakan dan "jalur-jalur masalah" yang berjalan sampai saat sekarang ini. Pendidikan yang merupakan lambang dari kejayaan serta kemajuan suatu bangsa terkadang harus termarginalkan terlebih lagi pendidikan Islam yang merupakan bagian dari suatu lembaga yang berada di bawah naungan kementerian agama dan tetap terpisahkan dalam kerangka kementerian pendidikan dan kebudayaan. Tulisan ini adalah bentuk dari penelitian kualitatif *library research* dengan pendekatan sosiologis yang melihat sejarah dan perkembangan pendidikan Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kendala, Perbaikan, Pendidikan Islam, Ideal

### Pendahuluan

Kondisi ironis pendidikan Indonesia adalah mengenai *goal setting* yang ingin dicapai melalui sistem pendidikan. Gambaran *riil* adalah lahirnya tipe *mechanic student* di mana setiap peserta didik sudah diposisikan pada orientasi pasar sehingga pendidikan bukan lagi berbasis keilmuan dan kebutuhan bakat peserta didik. Selain itu, munculnya mitologi ruang pendidikan yang dikukuhkan dengan ritual pendidikan. Artinya, anak bangsa dihadapkan pada ritual kompetisi, pemilihan sekolah favorit, penyuguhan uang "persembahan", pemakaian seragam baru, pembelian "ramuan-ramuan" buku-buku paket baru, dan segudang ritual lainnya. Munculnya *ambiguities* kebijakan pemerintah yang sebenarnya sebagai pengelola potensi anak bangsa, namun pemerintah justru menjadi penjaga mitos pendidikan. Pemerintah dengan sangat percaya diri memilih posisi lebih berpihak kepada kalangan elite, maka muncul *adigium* lelang pendidikan (Baharuddin, 2007: 7).

Jika dilihat pada situasi dan kondisi pendidikan Indonesia saat sekarang memang terlihat jelas adanya *gap* yang terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Ditambah lagi tidak bebasnya guru dalam berekspresi dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Terkadang tindakan yang baik menurut guru yang ingin dilakukan terhadap siswa malah mengantarkan guru berurusan dengan hukum karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kekangan seperti ini seakan-akan antara guru dan siswa mempunyai garis pembatas yang tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kendala pendidikan di Indonesia secara umum, diidentifikasi dalam empat krisis pokok, yakni menyangkut masalah; kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen. Berbagai indikator kuantitatif dikemukakan berkenaan dengan keempat masalah di atas, antara lain analisis komparatif yang membandingkan situasi pendidikan antara negara di kawasan Asia. Keempat masalah tersebut merupakan masalah besar, mendasar dan multidimensional,

sehingga sulit dicari ujung pangkal pemecahannya (Tilaar, 1991).

### Sejarah Lembaga Pendidikan Islam

Dalam sejarah, Islam telah berperan aktif dan berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada lembaga pendidikan Islam. Jika ingin melihat bagaimana Islam melakukan globalisasi terhadap ilmu pengetahuan Yunani, maka dicatat bahwa ilmu pengetahuan pernah menjulang tinggi di zaman kejayaan khalifah-khalifah Islam seperti pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Hal ini terlihat ketika puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas. Akan tetapi, tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Bani Abbas sendiri (Yatim, 2014: 129). Kebangkitan Islam sebagian telah dimulai sejak awal, seperti dalam bidang pendidikan misalnya, di awal Islam telah mulai berkembang lembaga pendidikan yang terdiri dari dua tingkat:

1. *Maktab/ kuttab* dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah, tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan dan tulisan; dan tempat para remaja belajar dasar-dasar ilmu agama, seperti: tafsir, hadits, fiqih, dan bahasa.
2. Tingkat pendalaman. Para pelajar yang ingin memperdalam ilmunya, pergi keluar daerah menuntut ilmu kepada seseorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Pada umumnya, ilmu yang dituntut adalah ilmu-ilmu agama. Pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau di rumah-rumah ulama bersangkutan. Bagi anak penguasa, pendidikan bisa berlangsung di istana atau di rumah penguasa tersebut dengan memanggil ulama ahli ke sana (Ibrahim, 1989: 129).

Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas, dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas, karena di samping terdapat kitab-kitab, di sana orang juga dapat membaca, menulis, dan berdiskusi (Zaidan, tt: 144).

Setelah perkembangan selanjutnya Islam tidak hanya melahirkan ahli-ahli dalam bidang ilmu agama, tapi juga melahirkan ahli-ahli dalam bidang ilmu umum dan bidang humaniora. Umat Islam tidak hanya mengembangkan ilmu-ilmu agama, tetapi juga melahirkan ahli-ahli ilmu pengetahuan di bidang sains.

Warisan umat Islam dalam bidang ilmu agama dan ilmu pengetahuan tersebut berdampingan dengan kemajuan dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan pada berbagai institusi lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia. Intinya umat Islam juga mewariskan berbagai lembaga pendidikan tinggi yang tersebar di berbagai negara, seperti di Baghdad (Universitas Baghdad), Mesir (Universitas

al-Azhar), India (Universitas Doudand dan Aligarch), Spanyol, Damaskus, Syria, Turki, dan sebagainya (Nata, 2014: 29).

Di Indonesia pendidikan Islam adalah pendidikan yang keterpinggiran dan marjinalisasi. Pada masa penjajahan Belanda, lembaga pendidikan Islam yang berorientasi pada surau, pondok pesantren dan lain sebagainya juga melakukan perlawanan terhadap imperium Belanda di Indonesia. Para pengajar di lembaga pendidikan Islam (*kiyai*) dan peserta didik (*santri*) melakukan semacam *silent opposition* dengan penjajah yang menginjakkan kaki di bumi nusantara.

Di lain pihak, kemunculan pendidikan yang membawa misi kristenisasi oleh Belanda berkembang pesat, karena mereka didukung dan mendapatkan keistimewaan dari penjajah Belanda. Sudah sewajarnya pendidikan missionaris pada saat itu lebih unggul dan bermutu baik karena lembaga kristen sudah lebih dulu dan berpengalaman dari pendidikan Islam yang masih berumur muda dan dalam perlawanan penjajah.

Pada masa-masa awal kemerdekaan, pendidikan Islam di Indonesia masih dalam garis marjinal. Azyumardi Azra mengatakan bahwa keadaan pendidikan Islam sepanjang sisa dasawarsa 1950-an dan bahkan dalam dasawarsa 1960-an, Indonesia adalah wilayah yang penuh gejolak, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam. Dasawarsa 1950-an ditandai dengan pertarungan politik dan ideologi sebagai akibat dari sistem multipartai. Dan partai-partai Islam gagal dalam mewujudkan keunggulannya dalam pemilu 1955. selanjutnya adalah meningkatnya kekuasaan dan dominasi Presiden Soeharto, yang dalam banyak hal menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi berbagai aspek kehidupan kaum muslimin, khususnya dalam bidang pendidikan (Azra, 2006: 3).

Pada perkembangan selanjutnya madrasah dan pondok pesantren mengalami modernisasi ketika Mukti Ali diangkat sebagai menteri agama. Modernisasi kedua lembaga pendidikan Islam itu ditandai dengan SKB Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P&K, dan Menteri Dalam Negeri) No. 6 Tahun 1975 yang menggariskan agar madrasah yang tertentu saja di pesantren umumnya pada semua jenjang sama posisinya dengan sekolah umum; dan untuk itu, kurikulum madrasah haruslah 70 persen pelajaran umum dan 30 persen pelajaran agama (Azra, 2006: 3). Dengan kebijakan ini pendidikan Islam mulai masuk dalam bingkai pendidikan nasional dan semakin mengalami peningkatan mutu dan SDM yang berada di lembaga pendidikan Islam.

Lembaga pendidikan Islam semakin menampakkan gasnya ketika pemerintah mengeluarkan UUSPN pada tahun 1989 dan UU Sisdiknas yang baru disahkan dan mengakui sistem pendidikan Islam dengan menetapkan madrasah

sebagai "sekolah umum" yang berciri khas agama Islam. Perkembangan lembaga pendidikan Islam semakin kuat ketika bermunculan eksperimen-eksperimen baru dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam yang terjadi sepanjang dasawarsa 1990-an.

Perjalanan lembaga pendidikan Islam dalam mengarungi abad 20 semakin memperlihatkan kecermelangannya ketika pada waktu itu bermunculan lembaga-lembaga pendidikan Islam swasta yang disebut sebagai sekolah Islam elite, sekolah Islam plus, sekolah Islam unggulan dan masih banyak lagi nama-nama lembaga pendidikan Islam yang boleh dikatakan mempunyai potensi dan daya saing yang tidak kalah dengan sekolah umum.

### Kendala Pendidikan Islam di Indonesia

Hampir sama dengan pendidikan umum lainnya, pendidikan Islam justru dinilai memiliki problematika yang lebih besar lagi. Di samping kendala kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen. Pendidikan Islam justru terkukung dalam kemunduran, keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan, sebagaimana yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam dibandingkan dengan mereka yang non Islam. Katakan saja, pendidikan Islam terjebak dalam lingkaran yang tak kunjung selesai yaitu persoalan tuntutan kualitas, relevansi dengan kebutuhan, perubahan zaman, dan bahkan pendidikan apabila diberi label "embel-embel Islam", dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan, meskipun sekarang secara berangsur-angsur banyak diantara lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan kemajuan (Soeroyo, 1991).

Hingga kini pendidikan Islam masih saja menghadapi permasalahan yang kompleks, dari permasalahan konseptual-teoritik, hingga persoalan operasional-praktis. Tidak terselainya persoalan ini menjadikan pendidikan Islam tertinggal dengan lembaga pendidikan lainnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan "kelas dua". Tidak heran jika kemudian banyak dari generasi muslim yang justru menempuh pendidikan di lembaga pendidikan non Islam.

Dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional menyebutkan pendidikan Islam merupakan sub-sistem pendidikan nasional. Jadi sistem pendidikan itu satu yaitu memanusiakan manusia, tetapi pendidikan memiliki banyak wajah, sifat, jenis dan jenjang, mulai dari pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat, pondok pesantren, madrasah, program diploma, sekolah tinggi, institusi, universitas, dsb., dan hakekat pendidikan adalah mengembangkan harkat dan martabat manusia, memanusiakan manusia agar benar-benar mampu menjadi khalifah (Mastuhu, 2003: 84).

Pendidikan Islam yang dibanggakan pada perguruan tinggi yang beralmamater Islam sebenarnya merupakan solusi terhadap pendidikan sekuler, tetapi pendidikan Islam sekarang ini dipandang sebagai acuan keterbelakangan dan kemunduran, bahkan simbol yang sering muncul ke permukaan ketika berbicara masalah pendidikan Islam adalah pendidikan yang hanya untuk kalangan garis bawah, bahkan sering disandingkan dengan teroris. Hal ini tentu tidak benar karena tidak ada lembaga pendidikan Islam yang merumuskan tujuannya untuk memproduk gerakan-gerakan kekerasan. Namun kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari banyak pola kekerasan tersebut yang sering bersandingan mengatasnamakan Islam. Dari sini mungkin ada kesalah pahaman dalam segi politik, sistem, proses dan bahkan orientasinya.

Menurut hemat penulis kendala pendidikan Islam jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya dapat berupa:

1. Rumusan yang terlambat dalam menanggapi kemajuan era sekarang dan akan datang
2. Hanya beroperasi pada bidang sosial dan humaniora
3. Pembaharuan yang tidak bersifat esensial
4. Berorientasi pada masa silam ketimbang masa depan
5. Belum profesional dalam pengelolaan

Mungkin hampir sama antara PTU (Perguruan Tinggi Umum) dan PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) bahwa permasalahan yang melanda sebagian besar lulusan perguruan tinggi di Indonesia adalah ketidak mampuan lulusan itu untuk cepat beradaptasi dengan kebutuhan dunia industri modern. Kondisi ini yang mengakibatkan tingkat pengangguran terdidik di Indonesia terus meningkat. Kedidak mampuan lulusan perguruan tinggi beradaptasi dengan kebutuhan dunia industri disebabkan oleh adanya kesenjangan mengenai kualitas lulusan perguruan tinggi antara pengelola perguruan tinggi dengan pengelola industri (Ramly, 2005: 29).

Tabel 1  
Kesenjangan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri di Indonesia (Ramly, 2005: 30)

Lulusan Perguruan Tinggi	Kebutuhan Industri
Hanya memahami teori	Kemampuan solusi masalah berdasarkan konsep ilmiah
Memiliki keterampilan individual	Memiliki keterampilan kelompok ( <i>teamwork</i> )
Memotivasi belajar hanya untuk lulus ujian	Mempelajari bagaimana belajar yang efektif
Hanya berorientasi pada pencapaian	Berorientasi pada peningkatan terus menerus

grade atau nilai tertentu (pembatasan target)	dengan tidak dibatasi pada target tertentu saja. Setiap target yang tercapai akan terus-menerus ditingkatkan
Orientasi belajar hanya pada mata kuliah individual secara terpisah	Membutuhkan pengetahuan terintegrasi antar disiplin ilmu untuk solusi masalah industri yang kompleks
Proses belajar bersifat pasif, hanya menerima informasi dari dosen	Bekerja adalah suatu proses berinteraksi dengan orang lain dan memproses informasi secara aktif
Penggunaan teknologi (komputer) terpisah dari proses belajar	Penggunaan teknologi merupakan bagian integral dari proses belajar untuk solusi masalah industri

### Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia

Pemerintah Indonesia sangatlah kecil mencurahkan porsinya untuk pendidikan Islam, padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang *sosialistis religious* (Usa, 1991: 11). Padahal pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu bingkai variasi dari konfigurasi sistem pendidikan nasional. Namun pendidikan Islam tidak diberikan kebebasan dan keluasaan untuk berkreasi dalam pengembangan dan penataan umat yang sangat besar jumlahnya ini. Dapat kita lihat dan rasakan begitu lucunya ketika menghitung jumlah frekuensi muslim yang begitu besar di negara ini, tetapi malah pendidikan Islam tidak mendapatkan kesempatan yang sama dan luas seperti halnya pendidikan umum lainnya. Di segi birokrasi, pendidikan Islam lebih dominan melakukan pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional, karena pendidikan Islam dianggap tidak bernaung di bawah kemendiknas. Hal itu jelas memberikan pergerakan yang amat sempit di bidang birokrasi bagi orang-orang yang beralmamatkan Islam.

PTAI juga sedang dihimpit oleh tantangan dunia pendidikan tinggi yang kian kompetitif. Dapat dilihat pada dunia internasional di berbagai negara maju yang telah lama menyelenggarakan pendidikan dengan standar mutu bertaraf internasional. Bahkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang dulunya berguru pada Indonesia kini lebih dengan penerapan sistem pendidikan tinggi yang modern. Dua negara tetangga tersebut sudah cukup jauh meninggalkan Indonesia melalui kualitas kurikulum, program studi, fasilitas pendidikan, SDM pendidikan, serta metodologi pembelajaran yang bertaraf internasional.

Globalisasi dalam bidang pendidikan juga mengakibatkan terjadinya fenomena pendidikan lintas negara dan bangsa. Apalagi Indonesia memberikan legitimasi melalui UU Sisdiknas No. 20

Tahun 2003 pasal 65 ayat 1, yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU RI No 20 Tahun 2003).

*Transnational education* yang didirikan oleh orang asing di Indonesia boleh jadi akan mengurangi minat peserta didik yang akan memasuki dunia kemahasiswaan dengan memilih lembaga pendidikan asing ketimbang lembaga pendidikan Islam karena secara kurikulum, media, alat dan hal-hal lainnya lembaga pendidikan asing lebih siap ketimbang lembaga pendidikan Islam.

Pada bulan April 2018 baru-baru ini tersiar di media-media bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan impor dosen asing yang akan digunakan di perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini menurut penulis tidak perlu dilakukan karena keadaan dosen di Indonesia sudah lebih dari cukup. Bahkan sebaiknya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen di Indonesia agar karya dan kerjanya semakin meningkat bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Globalisasi dan internasionalisasi memang merupakan sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia dari masa ke masa, termasuklah globalisasi dan internasionalisasi dalam dunia pendidikan seperti kebijakan impor dosen asing. Globalisasi dan internasionalisasi sesungguhnya bukanlah fenomena baru, karena sejak dulu proses globalisasi sudah terjadi. Menyebarnya agama Islam ke seluruh dunia, termasuk ke kawasan nusantara sejak abad ke 7 M adalah sebuah proses globalisasi. Akan tetapi akan konteks moderen globalisasi menjadi semakin intensif karena kemajuan sains dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi. Bagi PTKI tantangan globalisasi antara lain dapat dilihat dari aspek-aspek berikut: (Sukardi, 2008: 81).

1. Globalisasi memunculkan hegemoni dan dominasi negara-negara maju atas negara-negara berkembang dalam berbagai aspek kehidupan (ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya). Sebagian negara berkembang dan miskin (yang mayoritas muslim) mengalami ketergantungan terhadap negara maju dalam banyak hal. Agar dapat mandiri secara sosial, politik, dan ekonomi, berdaulat, dan tidak terus tergantung kepada negara-negara maju, maka negara-negara berkembang termasuk Indonesia, harus terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) nya.
2. Globalisasi memunculkan kompetisi antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kompetisi, persoalan mutu menjadi hal yang utama. Dari segi ekonomi, misalnya, mutu barang dan jasa menentukan apakah keduanya dapat diterima di pasar global. Pada gilirannya

persoalan ini terkait dengan mutu SDM yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Akan muncul tekanan dan tuntutan terhadap dunia pendidikan. Sistem pendidikan dituntut untuk menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif tuntutan dan tekanan ini akan mempengaruhi arah kebijakan dunia pendidikan, prioritas, relevansi program-program pendidikan, serta kualitas manajemen dan sistem pendidikan, termasuk pendidikan tinggi semacam PTAI.

3. Dampak lain dari kompetisi global, khususnya dalam bidang ekonomi adalah munculnya paradigma cara pandang baru terhadap dunia pendidikan. Salah satunya adalah pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi dan industri yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan (*benefit*) secara ekonomi. Pandangan ini di satu pihak menguntungkan karena orientasi pasar mengakibatkan para pengelola pendidikan berkompetisi menjadi yang terbaik dengan cara memperbaiki kualitas proses, sistem, dan output pendidikannya. Di pihak lain terdapat potensi negatif di mana pendidikan akan menjadi elitis, mahal, dan mengakibatkan fungsi sosialnya sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 (pendidikan adalah hak setiap warganegara).
4. Globalisasi juga menimbulkan dampak negatif, yakni lahirnya manusia-manusia (individu dan kelompok) yang mempunyai karakter negatif (kehilangan jati diri, moralitas, yang rendah, dan sebagainya) baik karena pengaruh arus informasi negatif yang sulit dibendung, maupun konsekuensi logis dari iklim kompetisi global dalam kehidupan materi. Yang disebut terakhir ini tidak jarang memunculkan manusia yang berwatak srigala yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sumber-sumber (*resources*) kehidupan ekonomi dan kekuasaan (politik). Ini bukan hanya memunculkan konflik antar manusia dan antar bangsa/ negara, tetapi juga kerusakan ekosistem karena eksploitasi alam yang eksekutif. Dengan kata lain dampak negatif proses globalisasi adalah meredupnya nilai-nilai spiritualitas manusia moderen.
5. Perkembangan informasi akademik dan dunia ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Penemuan baru hasil riset dan eksperimen dalam berbagai bidang keilmuan menyebabkan munculnya teori-teori baru yang terus menerus. Buku-buku baru dalam berbagai bidang keilmuan terus diproduksi. Jika terlambat mengikuti perkembangan ini maka PTKI akan terus tertinggal. Pada sisi lain seiring dengan arus informasi, wacana keilmuan di PTKI akan terus berinteraksi dengan berbagai wacana pemikiran dan keilmuan dari Barat yang sebagian belum tentu sejalan dengan aqidah dan syari'ah Islam. Munculnya wacana Islam liberal dan sejumlah

tema baru di dunia Islam (gender, demokrasi, *civil society*, HAM, dan lain-lain) kadang-kadang kontra produktif dan tidak selalu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mayoritas muslim Indonesia dan dunia. Karena itu perlu kajian mendalam di PTKI, wacana intelektual Islam bagaimana yang benar-benar pas dengan kebutuhan umat Islam.

### **Pendidikan Islam yang Ideal**

Inovasi dan pembaharuan fungsi pendidikan Islam harus dilakukan, terutama pada sistem pendidikan harus diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga usahanya dapat menjangkau pada perluasan dan pengembangan sistem pendidikan Islam yang baik. Penataan pendidikan Islam haruslah bersifat komprehensif dan menyeluruh, baik pada tingkat konsep maupun pada penyelenggaraan, tidak lagi *ad hoc* dan *incremental* seperti yang terjadi di masa silam (Azra, 2002: 17). Inovasi harus dilakukan melalui lembaga maupun tenaga kependidikannya. Perbaikan harus dilakukan pada aspek kurikulum (materi), pendekatan, metodologi yang masih beroperasi pada sistem tradisional, perbaikan pada aspek manajemen pendidikan itu sendiri.

Dari paparan di atas, dapat diambil beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pembaharuan pendidikan Islam diantaranya; *pertama*, melakukan perubahan visi misi dan tujuan serta mengembangkan landasan filosofis dan teori yang dikembangkan dengan konsep dasar kebutuhan manusia. Diperlukan penempatan kembali seluruh aktivitas pendidikan di bawah kerangka dasar kerja spiritual. Seluruh aktivitas intelektual dan proses pendidikan senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai agama, yang mana tujuan akhir dari seluruh aktivitas pendidikan sebagai upaya menegakkan ajaran agama dengan memanusikan manusia dalam konteks kehidupan.

Hal ini penting dilakukan, karena era globalisasi telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu komoditas yang diperdagangkan, atau sebagai produk yang dijual pada konsumen yang harus menguntungkan. Hal ini terlihat, antara lain seperti (1) masyarakat lebih memilih program studi yang lulusannya mudah mendapatkan pekerjaan yang secara ekonomi menguntungkan. Akibat dari keadaan yang demikian, maka program-program studi yang kurang *marketable* menjadi kurang diminati. (2) Masyarakat juga menganggap bahwa biaya pendidikan yang dikeluarkannya merupakan investasi yang harus menguntungkan. (3) Kemudian jumlah mahasiswa pada setiap kelas pada suatu prodi harus mencapai jumlah kuota tertentu, sehingga secara ekonomi tidak merugikan atau menimbulkan *break even point*. (4) Selanjutnya misi pendidikan adalah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan (*customer satisfaction*), (5) tujuan pendidikan menghasilkan lulusan yang siap pakai (*ready for use*) untuk dunia industri dan usaha. Visi

misi dan tujuan pendidikan yang demikian itu tidak sepenuhnya salah, karena melakukan aktivitas bisnis juga dianjurkan dalam Islam, sepanjang usaha bisnis tersebut sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan niat mencapai keridhaan Allah SWT., sehingga usaha ini memberikan nilai ibadah. Untuk visi misi dan tujuan pendidikan Islam harus disertai dengan upaya menjadikan pendidikan Islam sebagai pilar terdepan dalam membangun kebudayaan dan peradaban.

Dengan visi, misi dan tujuan ini, maka pendidikan tidak hanya diukur dari seberapa banyak memberikan keuntungan ekonomi, melainkan pada seberapa jauh pendidikan dapat memberdayakan sumber daya manusia, membangun, mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi fisik, pancaindra, akal, hati nurani, dan spiritualnya secara utuh, sehingga ia mampu melahirkan karya-karya inovatif baik fisik maupun non fisik, material maupun non material sebagai modal untuk membangun kebudayaan dan peradaban. Pendidikan bukan hanya menghasilkan para tukang atau pekerja untuk kepentingan kalangan usaha dan industri, melainkan sebagai orang-orang yang dapat melakukan pencerahan bagi masyarakat, meningkatkan pola pikir, pandangan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan pandangan semacam ini, biaya atau modal yang dikeluarkan untuk pendidikan tidak hanya diukur oleh keharusan mengembalikan uang modal tersebut, melainkan dibayar oleh kehidupan masyarakat yang makin berbudaya dan beradab. Demikian pula keberadaan berbagai Program studi yang tidak atau kurang *marketable* juga jangan langsung dihapuskan atau dibubarkan, melainkan tetapi dipelihara dan dihidupkan dengan cara dibantu atau disubsidi oleh program studi yang *marketable*. Untuk itu, walaupun jumlah mahasiswa dalam prodi tersebut hanya beberapa orang saja, seperti prodi/jurusan sejarah, antropologi, filsafat atau filologi, atau fakultas-fakultas agama, hendaknya prodi/jurusan ini tetap dibuka dan dihidupkan, karena jurusan walaupun tidak secara langsung memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi, namun sangat berperan besar dalam melahirkan manusia-manusia yang tercerahkan, arif, bijaksana, berbudaya dan bermartabat (Nata, 2014: 293-294).

*Kedua*, keseimbangan (*balancing*) antara disiplin atau ilmu agama dengan pengembangan intelektualitas dalam program kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan Islam harus menganut *integrated curriculum*, artinya perpaduan, koordinasi, harmonis, dan kebulatan materi-materi pendidikan dengan ajaran Islam, dan bukan *separated subject curriculum* maupun *correlated curriculum* (Nasution, 1990: 162).

Azyumardi Azra mengungkapkan dalam hal substansi pendidikan, terdapat kecenderungan kuat terjadinya penyederhanaan muatan kurikulum. Subyek yang dipandang tidak terlalu penting dan tidak relevan dengan kebutuhan global dihilangkan

dari kurikulum. Sebaliknya, subyek yang urgen dan instrumental bagi peserta didik dalam menghadapi realitas globalisasi, semakin mendapat penekanan penting, atau bahkan diprioritaskan (Azra, 2012: 53).

Dengan melakukan penyeimbang kurikulum dan isi bahan ajar, antara ilmu-ilmu yang terkait dengan pengembangan fisik, pancaindra, dan akal dengan pengembangan hati nurani dan spiritual. Dengan cara demikian akan terjadi keseimbangan antara kekuatan pancaindra dan akal dengan kekuatan hati nurani (moral) dan kesadaran spiritual. Dengan demikian berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diterima para lulusan, tidak akan digunakan untuk tujuan-tujuan merusak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, melainkan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muhaimin, 2009: 11). Maka dengan konsep *integrated curriculum*, proses pendidikan akan memberikan penyeimbang antara kajian-kajian agama dengan kajian lainnya (non-agama) dalam pendidikan Islam yang merupakan suatu keharusan, apabila menginginkan pendidikan Islam kembali *survive* di tengah perubahan masyarakat.

*Ketiga*, pengembangan pendidikan yang berwawasan kebebasan berbasis ilahiyah, sehingga insan akademik dapat melakukan pengembangan keilmuan secara maksimal. PTKI diharapkan memiliki kepekaan terhadap materi-materi baru yang aktual. Para dosen tidak berani mengajarkan materi-materi baru di kelas. Hanya seminar, workshop dan konferensi terbatas yang terkadang dapat menyajikan pembahasan-pembahasan aktual. Hal ini membuat proses belajar mengajar tidak menarik bagi mahasiswa. Yang lebih fatal adalah bahwa baik dosen maupun mahasiswa tidak dapat memberikan pemikirannya secara optimal terkait dengan isu-isu aktual, meskipun sebenarnya terkait dengan masalah keagamaan. Pada dasarnya mereka tidak dituntut untuk berbicara atau menulis tentang isu-isu kontemporer secara luas. Yang dituntut dari mereka adalah menyumbangkan pemikiran mereka sesuai kompetensi keilmuan mereka. Namun, hal ini tidak dilakukan secara maksimal karena para dosen dan mahasiswa hanya sibuk dengan hal-hal klasik yang telah mapan (Syamsuddin, 2008: 191-192).

Selama masa kemunduran Islam telah tercipta *stigma* dengan dikondisikan banyak sekat dan wilayah terlarang bagi perdebatan, perbedaan pendapat dan pandangan yang mengakibatkan sempitnya intelektual rasional. Kesempatan berijtihad yang selama ini dianggap tertutup juga menjadi malapetaka bagi perkembangan pemikiran rasional intelektual dan ikut terkubur. Dengan tidak mempunyai ruang bebas untuk mengekspresikan dan pemikiran, pandangan, dan gagasan, apabila muncul pemikiran baru yang berbeda dengan *mainstream*, sering kali dianggap sebagai pengkaburan, penyesatan dan penyimpangan dari agama dan

kadang kala, kritik terhadap pandangan dan pemikiran keagamaanpun dianggap sebagai kritik terhadap otoritas Tuhan, nabi dan lain-lain. Agama sudah dijadikan otoritas baru untuk memasung dan mengecilkan pemikiran yang inovatif. Dengan upaya menghilangkan atau minimal membuka kembali sekat dan wilayah-wilayah yang selama ini terlarang bagi perdebatan dan kajian, akan menjadikan wilayah pengembangan intelektual semakin luas yang tentunya membuka peluang selebarnya bagi pengembangan keilmuan di dunia pendidikan Islam pada khususnya dan Islam pada umumnya.

*Keempat*, beralih kepada manajemen dengan pendekatan sistem dan infrastruktur berbasis perilaku manusia. Dengan melakukan strategi pendidikan yang membumi pada kebutuhan nyata masyarakat yang akan menghantarkan peserta didik pada kebutuhan akhirat. Mengembangkan pendidikan Islam berwawasan kebudayaan dan masyarakat, pendidikan yang berwawasan kebebasan dan demokrasi, pendidikan yang mencerdaskan dan menyenangkan.

Dengan pendekatan sistem dan infrastruktur memungkinkan berbagai pelayanan dapat diberikan kepada pelanggan, tanpa membedakan antara satu dan lainnya, dan tanpa harus mengenal *owner* dari sebuah lembaga pendidikan. Manajemen yang berbasis sistem dan infra-struktur ini perlu dilengkapi dengan manajemen yang berbasis pada perilaku yang didasarkan pada hubungan dan komunikasi yang akrab, kepemimpinan yang efektif, budaya kerja yang unggul (*great culture*), *reward and punishment* yang adil. *Culture* yang demikian itu selanjutnya menjadi sumber nilai, sumber inspirasi, sumber imajinasi, sumber orientasi, dan menjadi pandangan kerja (*cognitive framework*). Dengan cara seperti ini akan lahir para pekerja yang unggul dan memiliki etos kerja yang tinggi (*great employer*) (Nata, 2014: 298).

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa untuk menuju pendidikan Islam yang ideal harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas, memiliki program pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, inovatif dan dapat mengembangkan ilmu dan teknologi, memiliki sumber manusia yang profesional, memiliki manajemen yang profesional dan bertanggung jawab. Setelah perubahan pada PTKI yang ideal maka diharapkan para lulusannya memiliki standar kompetensi pengetahuan (*knowledge*) kognitif yang memadai, memiliki kemampuan afektif yang baik, dan kemampuan psikomotorik yang terampil.

Dengan perubahan seperti yang telah dipaparkan di atas, maka pendidikan Islam perlu membangun sistem yang mampu mengembangkan sumber daya manusia yang ideal, dilandasi dengan nilai-nilai *ilahiyyah*, kemanusiaan *insaniyyah*, lingkungan dan berbudaya, manajemen pendidikan dengan berorientasi pada profesionalisme dan mutu, menyerap aspirasi dan mendayagunakan potensi

masyarakat, berorientasi pada otonomi, meningkatkan demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, serta memenuhi permintaan perubahan arus globalisasi. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa konsep hasil belajar yang lebih baik tentu saja berorientasi pada kemampuan kognitif, afektif, dan tindakan. Kemampuan bertindak terkait erat dengan pendidikan *life skills*, (Arikunto, 2008) yang berarti ketika lulusan dari suatu lembaga pendidikan Islam, sudah memiliki pengalaman yang cukup memadai dari kehidupan pendidikannya untuk melakukan sesuatu di masyarakat, yaitu berkewajiban mencari, menemukan dan memanfaatkan ilmu bagi keperluan umat manusia, sekaligus juga harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi selanjutnya jika dengan ilmu itu menimbulkan kerusakan lingkungan (Ma'arif, 2007: 7).

Menurut penulis dalam kerangka pendidikan Islam harus berupaya mengembangkan konsep *integralistic education*, yakni pendidikan secara utuh yang berorientasi pada ketuhanan, kemanusiaan serta alam sebagai suatu kesatuan bagi terwujudnya kehidupan yang *rahmatan lil 'alamin*. Pendidikan Islam juga perlu mengembangkan konsep *humanistic education*, yakni pendidikan yang selalu menganggap dan menghargai manusia beserta hak-haknya yang dikeluarkan lewat pendapat yang berbeda-beda, kebebasan berfikir, bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan, dan yang terpenting memandang manusia sebagai *humanisasi*. Konsep dalam pengembangan pendidikan Islam yang ideal juga harus berlandaskan *pragmatis education*, yakni pandangan tentang manusia merupakan makhluk yang membutuhkan kelangsungan hidup, mempertahankan dan mengembangkan jasmani dan rohani serta peka terhadap kebutuhan hidupnya dan masalah kemanusiaan. Selanjutnya mengembangkan konsep *cultur education*, yakni pendidikan yang berakar pada budaya yang dapat mewujudkan manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya kepada kemampuan sendiri, dapat membangun budaya sendiri yang berdasarkan nilai *ilahiyyah*.

Secara umum, konsep pendidikan Islam yang ditawarkan adalah pendidikan yang berorientasi pada kompetensi nilai-nilai ilahiyyah, knowledge, skill, ability, social-kultural dan harus berfungsi untuk memberikan kaitan secara operasional antara peserta didik dengan masyarakatnya, lingkungan sosial-kulturalnya, dan selalu menerima dan ikut serta melakukan perubahan (Sanaky, 2003: 301).

### Kesimpulan

Lembaga pendidikan Islam harus mulai membenahi, mencapai dan mengupayakan pendidikan yang bermutu dan unggul. Pendidikan yang diterima oleh peserta didik selama menempuh suatu proses pada lembaga pendidikan akan sia-sia

jika mutu proses dan output keluarannya tidak dapat bersaing dan dipakai pada masyarakat industri dan global.

Bagi masyarakat profesional, penilaian terhadap lembaga pendidikan yang bermutu dan unggul dapat dilihat ketika lulusannya dibutuhkan oleh pasar. Jadi masyarakat profesional di sini secara tidak langsung sebagai penilai (*quality control*) terhadap lembaga pendidikan.

Dari kesimpulan di atas sangat ditekankan dan dianjurkan pendidikan Islam untuk melakukan perbaikan pendidikan yang ideal terhadap program-programnya agar tercapai standar mutu dan unggul, sehingga memiliki lulusan yang menguasai kompetensi pengetahuan memadai, sikap yang *rahmatan lil 'alamin*, dan psikomotor yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna/ industri.

#### Daftar Pustaka

- AH Hujair. Sanaky, (2003), *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insani Press dan MSI
- Arikunto Suharsimi, (2008), *Swot dan Desain Kurikulum Pendidikan Islam MSI UII*, Makalah, Disampaikan dalam Workshop Kurikulum Ekonomi Islam dan Pendidikan Islam Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Senin, 16 Juni 2008
- Azra Azyumardi, (2002), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- \_\_\_\_\_, dan Jamhari, (2006), *Mencetak Muslim Modern; Peta Pendidikan Islam di Indonesia*, Penyunting; Jajat Burhanudin dan Dina Afrianty, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_, (2012), *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Milenium III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Baharuddin Ahmad, (2007), *Pendidikan Alternatif Qaryan Thayyibah*, Yogyakarta: Penerbit LKis
- Ibrahim Hassan, (1989), *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang
- Ma'arif Syamsul, (2007), *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mastuhu, (2003), *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insani Press dan MSI
- Muhaimin, (2009), *Pengembangan Kurikulum Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Nasution S, (1990), *Asas-asas Kurikulum*, Bandung: Penerbit Jemmars
- Nata Abuddin, (2014), *Sosiologi Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ramly Nadjamuddin, (2005), *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu
- Soeroyo, (1991), *Berbagai Persoalan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, VOL.1, Yogyakarta: Fak. Tarbiyah IAIN SUKA
- Sukardi Ismail, (2008), *Pendidikan Tinggi Islam dalam Sorotan; Pengembangan PTAI Ditengah Peluang dan Tantangan Global*, Palembang: Tunas Gemilang Press
- Syamsuddin Sahiron, (2008), *Pendidikan Tinggi Islam dalam Sorotan; Pengembangan PTAI di Tengah Peluang dan Tantangan Global*, editor: Ismail Sukardi, Palembang: Tunas Gemilang Poress
- Tilaar H.AR, (1991), *Sistem Pendidikan Nasional yang Kondusif Bagi Pembangunan Masyarakat Industri Modern Berdasarkan Pancasila*, Makalah Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional V
- Usa Muslih, (2005), *Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yatim Badri, (2014), *Sejarah Peradaban Islam; Dirasah Islamiyah II*, cet. ke-25, Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Zaidan Jurji, (tt), *Tarikh al-Tamaddun al-Islam*, Jilid 3, Kairo: Dar al-Hilal